

Tata Kelola Relokasi Pascabencana dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kabupaten Garut, Jawa Barat

Vera Arida¹, Ida Munfarida^{2*}

¹ Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, ID Scopus : 58562840700. Email: vera.arida@uinsa.ac.id

² Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, ID Scopus: 57209799104. Email: munfarida@uinsa.ac.id

<p><i>Received</i> 24 Oktober 2025</p> <p><i>Revised</i> 3 November 2025</p> <p><i>Accepted</i> 15 Desember 2025</p>	<p>Abstrak</p> <p>Banjir bandang Sungai Cimanuk tahun 2016 di Kabupaten Garut menyebabkan kerusakan permukiman dan mendorong pelaksanaan program relokasi sebagai bagian dari pemulihan pascabencana. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, relokasi tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga pada tata kelola yang menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola relokasi pascabencana dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan populasi 426 kepala keluarga di tujuh lokasi relokasi dan sampel 207 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin melalui proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi meningkatkan rasa aman dan kohesi sosial. Namun, masih terdapat tantangan tata kelola, seperti lemahnya pengawasan hunian, keterbatasan akses ekonomi, gangguan keamanan, dan potensi risiko lingkungan. Diperlukan penguatan tata kelola berbasis keberlanjutan untuk mendukung ketahanan permukiman jangka panjang.</p> <p>Kata kunci: Tata kelola relokasi; pascabencana; pembangunan berkelanjutan; ketahanan permukiman; manajemen permukiman</p>
<p><i>*Correspondence</i> Ida Munfarida Email: munfarida@uinsa.ac.id</p>	<p>Abstract</p> <p><i>The 2016 Cimanuk River flash flood in Garut Regency caused severe residential damage and led to the implementation of a relocation program as part of post-disaster recovery efforts. From a sustainable development perspective, relocation should not only focus on housing provision but also on governance quality that ensures social, economic, and environmental sustainability. This study aims to analyze post-disaster relocation governance and its implications for sustainable development in Garut Regency, West Java. A descriptive quantitative approach was employed involving 426 beneficiary households across seven relocation sites, with 207 respondents selected using Slovin's formula through proportional random sampling. Data were collected through structured questionnaires and interviews and analyzed descriptively. The findings indicate that relocation improved residents' sense of safety and strengthened social cohesion. However, governance challenges remain, including limited supervision of housing use, restricted economic access, security disturbances, and potential environmental risks. Strengthening sustainability-based governance is essential to support long-term settlement resilience.</i></p> <p>Keywords: Relocation governance; post-disaster; sustainable development; settlement resilience; settlement management</p>

PENDAHULUAN

Relokasi pascabencana merupakan salah satu instrumen kebijakan yang banyak digunakan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemulihan wilayah terdampak (Goswami et al., 2026). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, relokasi tidak sekadar dimaknai sebagai pemindahan fisik permukiman dari zona rawan, tetapi sebagai proses tata kelola yang kompleks yang melibatkan aspek sosial (Tuhkanen, 2023), ekonomi (Rashid & Sutley, 2026), spasial, dan kelembagaan (Gibb et al., 2025). Keberhasilan relokasi sangat ditentukan oleh kapasitas institusional, koordinasi antar pemangku kepentingan (Okunola, 2025) dan koordinasi lintas sektor (Suryanuddin & Annisah, 2021), serta kemampuan kebijakan dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat di lokasi baru (Mushtaha & Alaloul, 2025).

Banjir bandang Sungai Cimanuk pada September 2016 menyebabkan kerusakan luas (Sunarti et al., 2022) dan mendorong pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembangunan hunian tetap di tujuh lokasi relokasi (Pemerintah Kabupaten Garut, 2016). Intervensi ini dirancang untuk mengurangi paparan risiko bencana sekaligus menyediakan

permukiman yang lebih aman. Namun, dalam praktiknya, relokasi sering kali menghadapi tantangan tata kelola (Cao et al., 2026), seperti pengawasan pemanfaatan hunian, integrasi dengan perencanaan tata ruang (Zhang et al., 2026), akses ekonomi masyarakat, serta pengelolaan keamanan dan fasilitas publik (Ncube & Murray, 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa relokasi yang tidak terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berpotensi menimbulkan masalah baru, termasuk penurunan kesejahteraan ekonomi (Zhao et al., 2024), perubahan struktur sosial, serta kerentanan baru akibat ketidaksesuaian lokasi dan manajemen kawasan (Hu et al., 2025; Iuchi, 2024). Oleh karena itu, evaluasi tata kelola relokasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung ketahanan sosial dan keberlanjutan jangka panjang.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola relokasi pascabencana di Kabupaten Garut dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan mengkaji dinamika sosial ekonomi, kohesi sosial, keamanan lingkungan, serta pengelolaan permukiman di tujuh lokasi relokasi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap

penguatan kebijakan relokasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif untuk menganalisis tata kelola relokasi pascabencana dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan di tujuh lokasi relokasi pascabencana yang ditetapkan secara resmi berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 360/Kep.668.BPBD/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Biaya Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk Tahun 2016. Lokasi tersebut meliputi:

1. Sirnajaya (Blok Gadog) Kecamatan Tarogong Kaler;
2. Lengkong Jaya 1 (Lengkong Jaya) Kecamatan Karangpawitan;
3. Lengkong Jaya 2 (Cisureuh) Kecamatan Karangpawitan;
4. Lengkong Jaya 3 (Perum Parabon) Kecamatan Karangpawitan;
5. Cimuncang 1 (Blok Peer) Kecamatan Garut Kota;
6. Cimuncang 2 (Lempegan) Kecamatan Garut Kota;

7. Margawati (Rusun Margawati) Kecamatan Garut Kota.

Populasi penelitian berjumlah 426 kepala keluarga penerima bantuan hunian yang tersebar di tujuh lokasi tersebut. Sampel sebanyak 207 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% melalui teknik *proportional random sampling*. Karakteristik responden didominasi perempuan (59%) dengan rentang usia produktif 31–50 tahun (54%). Mayoritas bekerja sebagai buruh dan pedagang dengan tingkat pendidikan terakhir SD dan SMP serta pendapatan keluarga antara Rp1.000.000–Rp3.000.000 per bulan.

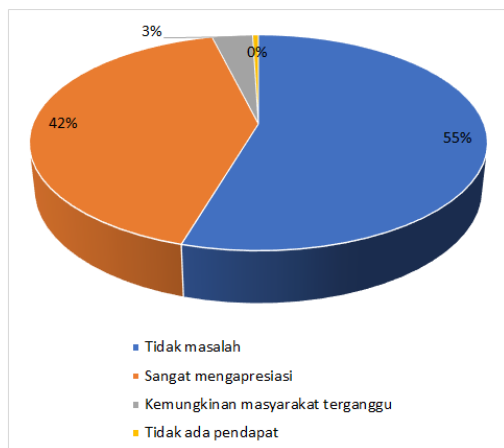
Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan wawancara pada periode Mei–Agustus 2023 yang mencakup aspek sosial ekonomi, kohesi sosial, keamanan lingkungan, dan pengelolaan permukiman. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Relokasi dan Ketahanan Sosial

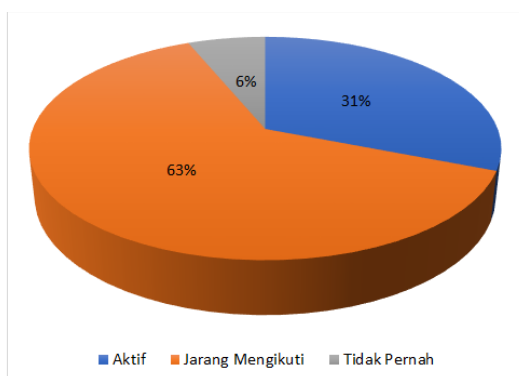
Temuan penelitian menunjukkan bahwa 97% responden menyambut positif program relokasi karena memberikan rasa aman dari ancaman banjir (Gambar 1).

Secara ilmiah, temuan ini menunjukkan bahwa relokasi berhasil memenuhi dimensi *risk reduction* dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya aspek keamanan fisik permukiman.



Gambar 1. Persepsi Tentang Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Banjir Bandang

Selain itu, 94% responden menyatakan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang mengindikasikan adanya modal sosial yang relatif kuat di lokasi relokasi (Gambar 2). Dominasi usia produktif (54% berusia 31–50 tahun) turut mendukung kapasitas adaptif komunitas.



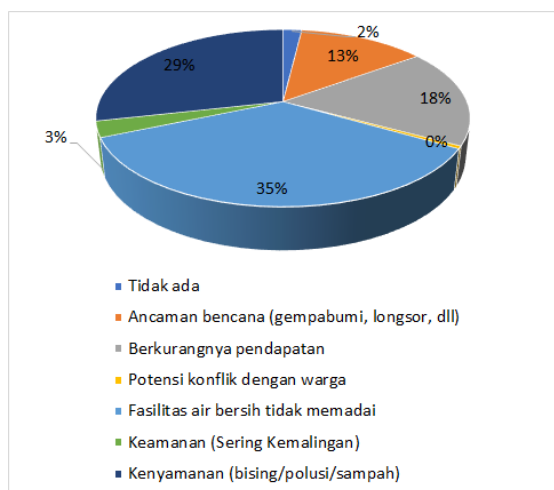
Gambar 2. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial Masyarakat

Namun, tingkat partisipasi aktif yang lebih rendah di beberapa lokasi menunjukkan bahwa kohesi sosial dipengaruhi oleh komposisi penghuni, terutama ketika terdapat warga non-korban yang menempati hunian relokasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hu et al. (2025) dan Iuchi (2024) yang menyatakan bahwa relokasi dapat mengubah struktur sosial dan jaringan komunitas, terutama bila tidak disertai mekanisme integrasi sosial yang memadai.

Implikasi Ekonomi Relokasi

Sebagian besar responden memiliki pendapatan Rp1.000.000–Rp3.000.000 per bulan dan bekerja sebagai buruh (55%) dan pedagang (25%). Namun, 18% responden menyatakan mengalami penurunan pendapatan setelah relokasi karena jarak hunian yang lebih jauh dari pusat aktivitas ekonomi (Gambar 3). Temuan ini menunjukkan bahwa relokasi yang tidak terintegrasi dengan perencanaan ekonomi lokal berpotensi menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rachmawati & Purnomo (2023) yang menunjukkan bahwa korban relokasi pascabencana di Sidoarjo harus melakukan berbagai strategi adaptasi ekonomi, seperti alih profesi, pola nafkah ganda, peningkatan keterampilan, serta pemanfaatan jaringan sosial untuk

mempertahankan keberlangsungan hidup. Studi tersebut menegaskan bahwa relokasi yang tidak diintegrasikan dengan kebijakan penguatan ekonomi berkelanjutan berisiko memperbesar tekanan ekonomi rumah tangga dan menciptakan kerentanan baru.



Gambar 3. Kekhawatiran Akibat Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Banjir Bandang

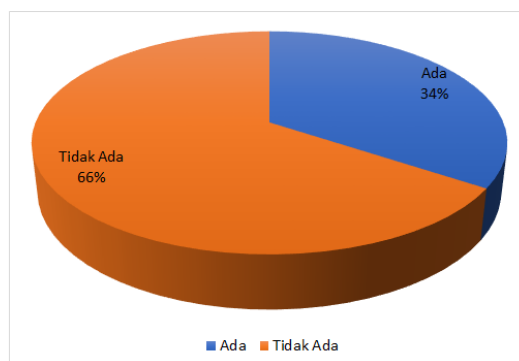
Secara teoretis, keberlanjutan relokasi tidak hanya ditentukan oleh keamanan fisik tetapi juga keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*).

Hasil ini konsisten dengan Zhao et al. (2024) dan Goswami et al. (2026) yang menemukan bahwa relokasi tanpa dukungan ekonomi dapat memunculkan risiko sosial-ekonomi baru dan memperkuat kerentanan jangka panjang.

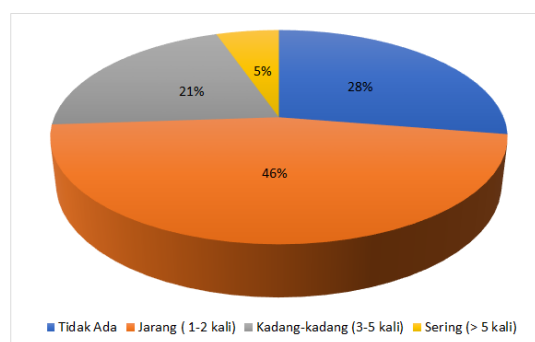
Tantangan Tata Kelola Permukiman

Penelitian menemukan adanya kelemahan pengawasan pemanfaatan

hunian, ditunjukkan oleh praktik penyewaan dan penjualan rumah kepada pihak non-korban. Selain itu, 66% responden menyatakan tidak adanya petugas keamanan tetap, dan 72% responden menyebutkan terdapat gangguan keamanan dan ketertiban (Gambar 4). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama relokasi berada pada aspek tata kelola pascapembangunan (*post-construction governance*).



(a)



(b)

Gambar 4. (a) Persepsi responden terhadap ketersediaan petugas keamanan; (b) Persepsi responden terhadap kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan.

Secara ilmiah, temuan ini mengindikasikan bahwa relokasi belum

sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka *sustainable settlement management*. Ketiadaan sistem monitoring dan pengawasan yang kuat dapat menciptakan risiko sosial baru serta menurunkan efektivitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan Cao et al. (2026) yang menegaskan bahwa faktor kelembagaan dan supervisi pemerintah menjadi determinan utama keberhasilan relokasi jangka panjang.

Integrasi Spasial dan Risiko Baru

Meskipun relokasi berhasil mengurangi paparan terhadap risiko banjir, beberapa lokasi menghadapi potensi risiko baru seperti ancaman longsor dan keterbatasan akses fasilitas publik (Gambar 5).



Gambar 5. Tebing di belakang rumah RT Blok Peer dikhawatirkan longsor

Studi sebelumnya menyatakan bahwa relokasi yang tidak terintegrasi

dengan perencanaan tata ruang berkelanjutan berpotensi hanya memindahkan risiko, bukan menghilangkannya (Azmi & Sunarno, 2021; Pramudika Tawil et al., 2024; Wahyuni & Sakir, 2021). Birkmann et al. (2026) menyebut fenomena ini sebagai *risk transfer*, yaitu ketika kebijakan pengurangan risiko di satu aspek justru memunculkan kerentanan di aspek lain. Dengan demikian, keberhasilan relokasi harus diukur secara multidimensional, tidak hanya berdasarkan pengurangan risiko awal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa tata kelola relokasi di Kabupaten Garut telah berhasil meningkatkan keamanan fisik dan memperkuat modal sosial, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama terletak pada integrasi ekonomi, pengawasan kelembagaan, dan manajemen permukiman jangka panjang.

Oleh karena itu, relokasi pascabencana perlu diposisikan sebagai proses tata kelola berkelanjutan yang melibatkan koordinasi lintas sektor, integrasi perencanaan spasial, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar tidak menimbulkan kerentanan baru di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola relokasi pascabencana di Kabupaten Garut telah meningkatkan keamanan fisik permukiman dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Namun, relokasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek ekonomi, kelembagaan, dan perencanaan spasial. Keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan, lemahnya pengawasan pemanfaatan hunian, serta adanya gangguan keamanan dan potensi risiko lingkungan menunjukkan bahwa relokasi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan jangka panjang. Selain itu, relokasi berpotensi memindahkan risiko ke bentuk lain apabila tidak didukung oleh perencanaan tata ruang yang komprehensif. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan hunian, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penguatan tata kelola berbasis keberlanjutan melalui integrasi kebijakan lintas sektor, peningkatan pengawasan, dan pengembangan ekonomi lokal diperlukan untuk mendukung ketahanan permukiman secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya atas pendanaan penelitian ini serta kepada Pemerintah Kabupaten Garut atas izin pelaksanaan penelitian..

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, M. Q. S., & Sunarno, S. (2021). Fungsi “Land Use Planning” dalam mitigasi Resiko bencana Erupsi Gunung Sinabung. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 288–304. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.12077>
- Birkmann, J., Fernando, N., Jamshed, A., Lauer, H., & Djalante, R. (2026). Short- and long-term impacts of relocation and buffer zones: the Indian Ocean Tsunami 2004 to 2024. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105974>
- Cao, S., Fang, D., & Li, Z. (2026). Identifying key government-manageable factors in post-disaster housing reconstruction: Evidence from flood events in China. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105957>
- Gibb, C., Albuero-Cañete, K. Z., & Iuchi, K. (2025). Deconstructing the concept of camp governance toward practice-based theory building on post-disaster relocation. *International Journal of Comparative Sociology*, 66(3 Special Issue: Camp Governance: (Dis)Order, Power, and Plurality), 459–495. <https://doi.org/10.1177/00207152251325224>
- Goswami, S., Patil, T., & Raju, E. (2026). A scoping review of risk creation in

- disaster-induced resettlement in the urban. *Cities*, 171. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106707>
- Hu, W., Xiang, C., & Xie, Y. (2025). Examining the impact of resettlement typologies in post-disaster social integration: a framework of social and spatial isolation. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*. <https://doi.org/10.1080/13467581.2025.2575263>
- Iuchi, K. (2024). Adaptability of Low-Income Communities in Postdisaster Relocation: A Long-Term Study Following Typhoon Haiyan. *Journal of the American Planning Association*, 90(1), 2–17. <https://doi.org/10.1080/01944363.2022.2133781>
- Mushtaha, A. W., & Alaloul, W. S. (2025). Sustainability factors influencing post-disaster reconstruction projects: Critical review and bibliometric analysis. In *Sustainable Futures* (Vol. 10). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100930>
- Ncube, T., & Murray, U. (2025). Managing two locations: Relocation, resettlement and negotiated immobility of climate-displaced communities in Zimbabwe. *World Development Perspectives*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2025.100676>
- Okunola, O. H. (2025). Exploring multi-level governance arrangements in disaster recovery: A study of Lagos, Nigeria. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105254>
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2016). *Keputusan Bupati Garut Nomor 360/Kep.668.BPBD/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Biaya Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk Tahun 2016*. Kabupaten Garut.
- Pramudika Tawil, Y., Pratama, I., & Salmon, P. (2024). *KAJIAN KEBIJAKAN TATA RUANG PASCA BENCANA: STUDI DI DESA TOMPE, DONGGALA, SULAWESI TENGAH POST DISASTER SPATIAL PLANNING POLICY STUDY: A STUDY IN TOMPE VILLAGE, DONGGALA, CENTRAL SULAWESI* Muzakir Tawil 2 Dedi Febrianto 3. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior>
- Rachmawati, A. P., & Purnomo, A. (2023). Strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi korban lumpur Lapindo pasca relokasi di Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 335–345. <https://doi.org/10.17977/um063v3i42023p335-345>
- Rashid, M. S., & Sutley, E. J. (2026). Managed retreat in the face of sea level rise: A multi-dimensional framework for climate resilience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105952>
- Sunarti, E., Erwini, H. M., Fadhlurrahman, Z., Marwiah, & Fithriyah, A. F. (2022). Damage, Loss, Economic Pressure, and Time Required For Family Asset Recovery of Garut Flash Flood Survivor. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 989(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/989/1/012010>
- Suryanuddin, & Annisah. (2021). *Kolaborasi Stakeholder pada Pelaksanan Inovasi Pe.*

- Tuhkanen, H. (2023). Shifting power through participation in post-disaster recovery: A scoping review. In *International Journal of Disaster Risk Reduction* (Vol. 97). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.104041>
- Wahyuni, H., & Sakir. (2021). Mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) in Disaster Prone Areas Of Sleman Regency. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 09(1), 131–150.
- Zhang, S., Wang, Q., Ma, R., & Furuya, K. (2026). Integrating disaster risk reduction with planning and design across scales: A review of research trends, challenges, and solutions. In *Progress in Disaster Science* (Vol. 29). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2026.100531>
- Zhao, T., Wu, X., Cheng, Y., & Liu, W. (2024). Does disaster resettlement reshape household livelihood adaptive capacity in rural China? *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1412058>